

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101  
TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**INTISARI**

**Septiya Hidayatun Nur<sup>1</sup>, Diah Ayu Puspendari<sup>2</sup>**

Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu di bidang hukum kesehatan berkaitan dengan bagaimana Implementasi PP No. 76 tahun 2015 tentang Perubahan PP No.101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, dalam rangka perbaikan data dan kuota penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional di kabupaten Lombok Timur agar dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan amanat UUD RI tahun 1945.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris karena penelitian ini meneliti data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan responden dan narasumber serta melakukan studi kepustakaan dengan menelaah data skunder seperti peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan untuk analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari PP No. 76 tahun 2015 tentang Perubahan PP No.101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di kabupaten Lombok Timur belum terlaksana dengan baik dan maksimal karena belum sesuai dengan Permensos No. 5 tahun 2016 tentang pelaksana dari peraturan pemerintah tersebut. Belum maksimalnya implementasi dari peraturan pemerintah ini tentu disebabkan karena terdapat beberapa hambatan diantaranya, masalah komunikasi, masalah kapasitas dan ketersediaan sumber daya.

**Kata Kunci:** Implementasi, Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jaminan Kesehatan Nasional.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 76  
YEAR 2015 REGARDING AMENDMENT OF GOVERNMENT  
REGULATION NUMBER 101 YEAR 2012 REGARDING SUBSIDIZED  
MEMBER OF NATIONAL HEALTH INSURANCE IN EAST LOMBOK  
REGENCY**

***ABSTRACT***

**Septiya Hidayatun Nur<sup>3</sup>, Diah Ayu Puspandari<sup>4</sup>**

This study aims to develop the science in health law area be related to how Implementation of PP No.76 year 2015 regarding amendment of PP No. 101 year 2012 regarding Subsidized Member Of National Health Insurance, in order to improve data and quota of subsidized member of national health insurance in East Lombok Regency in order to realize the welfare of society in health area based on mandate of the constitution.

This research is empirical legal research because examine the primary data is obtain from survey. To collect primary data to be done with interview from respondents and informant and literature study by reviewing secondary data consists of material of law such as the regulation and doctrine is suitable with this research, while for analysis with descriptive qualitative.

The result of this research is the implementation of PP No.76 year 2015 regarding amendment of PP No. 101 year 2012 regarding Subsidized Member Of National Health Insurance in East Lombok regency actually has not been maximum even though there is a regulation of social minister number 5 year 2016 as Implementation PP No.76 year 2015. The implementation of PP No 76 year 2015 has not been maximum because of there are many obstacles such as less resources, availability of funds, lack of coordination with the center, lack of socialization and people awareness.

Keywords: Implementation, Subsidize Member (PBI), National Health Insurance.

---

<sup>3</sup> Student Magister of health law, Postgraduate Program, Law Faculty, Gadjah Mada University

<sup>4</sup> Lecturer of Law Faculty, Gadjah Mada University